

► JALAN TOL BALI

Menyoal Kepemilikan Saham Wika

Pembangunan jalan tol Bali sudah mencapai 92% dan akan beroperasi pada Juni.

Thomas Mola
redaksi@bisnis.co.id

Di balik cerita kesuksesan pembangunan jalan tol di atas permukaan laut dangkal itu, menyilipkan cerita gonjang-ganjing hengkangnya salah satu anggota konsorsium BUMN, PT Wijaya Karya Tbk (Wika) di PT Jasamarga Bali Tol.

Niat Wika keluar dari PT Jasamarga Bali Tol dimulai di awal tahun ini ketika Wika menyatakan keluar dengan alasan mengembangkan usaha lain. Bak gayung bersambut, niat Wika keluar langsung disusul dengan masuknya dua investor baru yakni Pemkab Badung dan Pemprov Bali.

Seperti dilansir situs resmi PT Jasa Marga Tbk, Wika sebagai salah satu pemegang saham Jasamarga Bali Tol melepaskan kepemilikan saham dan menjualnya kepada Pemprov Bali dan Pemkab Badung.

Saham Wika dilepas dengan harga Rp1.674.836 per lembar saham. Nilai ini didasarkan kepada laporan hasil valuasi saham Jasamarga Bali Tol yang disampaikan oleh Dirutnya, Tito Karini,

yang disepakati oleh para pemegang saham untuk menetapkan nilai nominal per lembar saham Rp 1.000.000 dengan nilai pasar wajar Rp 1.674.836 per lembar saham.

Namun keluarnya Wika dari Jasamarga Bali Tol harus mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan amendemen badan usaha jalan tol (BUJT). Dalam hal ini Jasamarga Bali Tol.

BELUM KELUAR

Awal bulan ini, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat antara BUMN Konstruksi dan Komisi V DPR, Sekertaris Perusahaan Wika Natal Argawan Pardede memastikan perseroan masih memiliki 5% saham di Jasamarga Bali Tol.

Saham milik perseroan kemungkinan akan berkurang untuk memberi peran lebih besar kepada pemerintah daerah Bali. Pengajuan perubahan saham sendiri hanya dapat dilakukan oleh BUJT.

"Kami belum keluar dari tol Bali, Menteri Pekerjaan Umum tidak menginginkan hal itu," jelas Natal.

Seperti diketahui dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Perusahaan	Saham Baru	Sebelumnya
PT Jasa Marga Tbk	55	60
PT Pelindo III	17,98	20
PT Angkasa Pura I	8	10
PT Wijaya Karya*	--	5
PT Hutama Karya	1	2
PT Adhi Karya Tbk	1	2
PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap	1	1
Pemprov Bali	8,01	--
Pemkab Badung	8,01	--

Sumber: Jasamarga Bali Tol
Ket. *) Dalam proses pelepasan

Umum No. 06/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol dalam Pasal 14 mengatur pengalihan saham BUJT sebelum jalan tol beroperasi secara keseluruhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Persetujuan menteri tersebut dapat diberikan kepada BUJT dengan beberapa kriteria yakni satu atau lebih pemegang saham tidak mampu memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban penyerta modal pada BUJT dalam batas waktu yang ditentukan dalam PPTJ atau bermaksud untuk tidak meneruskan/mengurangi investasinya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya proses pengusahaan jalan tol.

Selain itu, adanya usulan BUJT untuk melakukan pengalihan saham yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham;

dan calon pemegang saham BUJT memiliki reputasi yang baik dan memenuhi kewajiban untuk setoran modal.

Niat Wika keluar atau mengurangi kepemilikan sahamnya tampaknya tinggal menunggu waktu.

Menteri BUMN Dahlan lakan juga sudah mengimbau agar BUMN konsorsium pemilik saham minoritas di Jasamarga Bali Tol keluar untuk mengembangkan usaha di bidang lain. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Ghazaly dalam pesan pendeknya mengungkapkan Wika tidak boleh keluar, tetapi pemda dapat masuk. Artinya sangat terbuka kemungkinan Wika dan konsorsium lainnya mengurangi saham mereka.

Namun pertanyaan nakal muncul mengapa harus keluar ketika usaha jalan tol itu memiliki potensi bisnis yang sangat

► Saham Wika dilepas dengan harga Rp1.674.836/lembar.

► Pengalihan saham sebelum beroperasi harus persetujuan Menteri.

baik. Pembangunan jalan tol untuk mendukung kelancaran Konferensi Tingkat Tinggi APEC membuat masyarakat Indonesia bangga dengan sinergi BUMN dan pemerintah daerah.

Ditambah lagi pengerjaan konstruksi juga digarap oleh BUMN Karya yakni PT Waskita Karya, PT Adhi Karya Tbk dan PT Hutama Karya.

Seperti diketahui tarif jalan tol Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa merupakan satu-satunya jalan tol di Pulau Dewata. Dengan tingkat kemacetan yang mulai sering terjadi di Bali nilai bisnis jalan tol Bali jelas sangat potensial.

Tarif jalan tol sepanjang 11,5 km tersebut akan dipatok Rp1.000 per km, sementara sepeda motor Rp400 per km.

Namun, Direktur Wika Budi Harto mengatakan perseroan tidak akan melepas dan hanya akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham di Jasamarga Bali Tol.

"Tidak, biar saja untuk kenangan," katanya se usai rapat umum pemegang saham perseroan, Kamis (25/4). □